

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Berbicara tentang perlindungan konsumen, sama halnya dengan membicarakan tanggung jawab produsen/ tanggung jawab suatu produk, karena pada dasarnya tanggung jawab produsen dimaksudkan untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 butir (1), ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah : “Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan konsumen”.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 tentang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa konsumen adalah : “Setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan”.

Tujuan perlindungan kepada konsumen itu antara lain adalah meningkatkan harkat dan martabat konsumen serta membuka akses informasi tentang barang dan/ atau jasa baginya dan menumbuhkembangkan sikap

prilaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab, meskipun antara pihak produsen dan konsumen tidak pernah bertemu langsung.

Secara umum dikatakan bahwa alasan pembebanan tanggung jawab bagi penyedia pemasok produk adalah akibatnya merusak suatu produk yang dipasok dihasilkan yang berada dalam kondisi cacat/rusak. Namun pernyataan ini terlalu luas pengertiannya karena ada situasi dimana sebenarnya suatu produk tidak mempunyai kesalahan/kecacatan namun hukum menghendaki tanggung jawab produk tersebut.¹

Sebelum membahas tentang hak dan kewajiban pelaku usaha maka hal yang penting untuk diketahui adalah definisi produsen atau pelaku usaha. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Perlindungan Konsumen dikemukakan bahwa pelaku usaha adalah : “ Setiap perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian penyelenggaraan kegiatan usaha dalam berbagai kegiatan ekonomi”².

Seperti halnya dengan konsumen, demi tercapainya hubungan yang seimbang antara produsen dan konsumen sebagai salah satu tujuan UUPK maka Undang-Undang ini menggariskan hak pelaku usaha dalam Pasal 6, sebagai berikut :³

¹ http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/view/1418/1373, diakses pada tanggal 3 Juni pukul 19.30 WIB.

² Pasal 1 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

³ Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad buruk;
- c. Melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen yang telah diuraikan terdahulu, maka kepada pelaku usaha dibebankan pula kewajiban-kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 7, yaitu:⁴

- a. Beritikad baik dalam melakukan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur serta tidak diskriminatif;

⁴ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/ atau mencoba barang dan/ atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/ atau garansi atas barang yang dibuat dan/ atau diperdagangkan;
- e. Menjamin mutu barang dan/ atau jasa yang diproduksi dan/ atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu dan jasa yang berlaku;
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan, barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan;
- g. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian apabila barang dan/ atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Seperti kasus yang baru muncul saat ini, yaitu dimana dugaan penipuan yang dilakukan oleh perusahaan PT. Aku Gigital Indonesia atau Akumobil yang dirasa telah merugikan sekitar lebih dari 1.700 orang konsumen, dimana dikarenakan pertama-tama perusahaan PT. Akumobil ini menawarkan unit mobil murah yang diperdagangkan dan dipromosikan dengan harga mobil murah dibawah harga pasaran pada umumnya, lalu setelah banyak konsumen yang mendaftarkan diri untuk menjadi sebagai pembeli mobil diwajibkan membayar lunas sesuai dengan harga yang diperdagangkan tersebut. Namun setelah beberapa bulan dari pelunasan pembayaran tersebut para konsumen yang membeli mobil di perusahaan PT. Akumobil tersebut tidak kunjung mendapatkan mobil pesanannya, hingga sampai saat ini para konsumen merasa sangat dirugikan sebagai konsumen.

Kasus ini berawal dari para konsumen yang tergiur dengan agenda atau program bernama flash sale yang diselenggarakan oleh PT. Akumobil dengan cara penjualan cepat. Para konsumen yang ditawarkan dengan display harga mobil yang tidak semestinya. Harga yang ditawarkan pun jauh lebih murah dari pasaran yang semestinya yaitu hanya sepertiga harga standar.

Kuat dugaan dalam mekanisme penjualan mobil yang dilakukan oleh perusahaan PT. Akumobil yaitu dengan skema Ponzi, dimana modus penjualan ini yang membayarkan keuntungan kepada pembeli lain dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh pembeli berikutnya atau lebih sering dikenal dengan skema Piramida. Skema Ponzi biasanya membujuk para calon pembeli baru dengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kelangsungan dari keberhasilan dalam penjualan ini harus membutuhkan aliran yang terus menerus meningkat dari uang yang didapat dari pembeli baru untuk menjaga kelangsungan skema ini terus berjalan.

Karena pemasangan dan promosi harga yang sangat berlebihan itu tersebut, sekilas membuat orang yang mengetahuinya menjadi penasaran dan akhirnya tergiur untuk membelinya. Dalam penawarannya PT. Akumobil membuka event-event atau ajang promosi melalui beberapa mall-mall besar di kota Bandung dan para konsumen yang melihat penawaran dengan display harga murah tersebut pun akhirnya mengikuti program flash sale yang diselenggarakan PT. Akumobil.

Para konsumen yakin dan percaya bahwa promosi yang dilakukan oleh PT. Akumobil itu secara benar dan sungguh-sungguh dikarenakan selain melakukan promosi melalui sosial media, PT. Akumobil pun sering melakukan promosi melalui event-event di mall-mall besar dan ternama di Kota Bandung.

Setelah membayar uang muka di awal untuk calon pembeli, konsumen tersebut kemudian diminta untuk mentransfer sisa dari uang muka yang telah dibayarkan untuk segera di penuh atau dilunaskan dengan waktu yang tidak lebih dari 1 jam setelah diumumkan menjadi pemenang dalam undian flash sale tersebut dan mobil akan dijanjikan akan diantar kepada pembeli dalam kurun waktu 2 bulan dari pembelian. Namun setelah para konsumen melunasi pembelian mobil tersebut, unit mobil yang dijanjikan akan dikirim kepada pembeli tidak kunjung datang sampai waktu yang telah ditentukan.

Oleh karena itu penulis dalam penulisan hukum ini akan membahas dan memfokuskan pada kepastian hukum mengenai pengembalian dana yang harus didapatkan oleh para konsumen korban perusahaan PT. Akumobil yang dirasa sangat dirugikan dengan adanya kasus tersebut.

Kepastian hukum secara normative adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam aturan tidak menimbulkan keragu-raguan (multi tafsir) dan logis. Jelas dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konstisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan

yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.

Kepastian hukum merupakan jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum serta bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Akhirnya hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum yang berasal dari ajaran yuridis-dogmatik yang didasarkan pada aliran pemikiran positifisme di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom yang mandiri, karena bagi penganut aliran ini, tujuan hukum tidak lain sekedar menjamin terwujudnya oleh hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa

tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian⁵.

Dengan demikian, penulis tertarik untuk Mengkaji dalam penulisan hukum dalam bentuk skripsi yang berjudul **“KEPASTIAN HUKUM TERHADAP PENGEMBALIAN DANA KONSUMEN KORBAN PENIPUAN OLEH PERUSAHAAN PT. AKUMOBIL DALAM PERSEPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN”**.

B. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana kepastian hukum terhadap konsumen korban perusahaan PT. Akumobil dalam persepektif perlindungan konsumen?
2. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan PT. Akumobil dalam persepektif perlindungan konsumen?
3. Bagaimana upaya penyelesaian pengembalian dana yang dapat dilakukan oleh konsumen perusahaan PT. Akumobil dalam merealisasikan penyelesaian sengketa terhadap kasus Akumobil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang kepastian hukum terhadap konsumen korban perusahaan PT. Akumobil dalam persepektif perlindungan konsumen.

⁵ Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya, Bandung, 1999, hlm.23.

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum perusahaan PT. Akumobil dalam persepektif perlindungan konsumen.
3. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis tentang upaya penyelesaian pengembalian dana yang dapat dilakukan oleh konsumen perusahaan PT. Akumobil dalam merealisasikan penyelesaian sengketa terhadap kasus Akumobil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan berguna bagi pengembangan ilmu hukum secara umum khususnya di bidang perlindungan konsumen, perundang-undangan dan bagi sistem penjualan yang dilakukan perusahaan PT. Akumobil dalam melaksanakan pertanggungjawaban dan kepastian hukum terhadap implementasi perlindungan konsumen.

2. Kegunaan Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat kepada praktisi dan instansi terkait dalam bidang perlindungan konsumen serta penegakan hukum perlindungan konsumen.

E. Kerangka Pemikiran

1. Kerangka Teori

Sebagai Negara Hukum Indonesia mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan bagi setiap warga masyarakat seperti yang ditegaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tercantum pada

pasal 1 ayat (3) amandemen ke-IV Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia sebagai Negara Hukum memberikan konsekuensi bahwa dalam bertindak dan bertingkah laku harus berlandaskan pada hukum.

Serta seperti yang di amanahkan juga dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.”⁶

Kemudian tujuan nasional dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut merupakan konsekuensi hukum yang mengharuskan pemerintah tidak hanya melaksanakan tugas pemerintah saja, melainkan juga kesejahteraan sosial dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, sentosa melalui pembangunan nasional. Selain itu, amanat dalam alenia keempat terdapat kata “mewujudkan” dalam hal ini berkaitan dengan positivisme hukum dalam teori murni. Serta landasan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia, karena kata melindungi mengandung asas perlindungan hukum bagi segenap bangsa Indonesia untuk mencapai keadilan⁷.

Dalam konteks hukum perlindungan konsumen terdapat prinsip-prinsip yang berlaku dalam bidang hukum. Prinsip-prinsip itu ada yang masih berlaku sampai sekarang tetapi ada pula yang ditinggalkan seiring dengan tuntutan kesadaran hukum masyarakat yang terus meningkat.

⁶ Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

⁷ Prof. Dr. H.R Otje Salman Soemadinigrat, S.H, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Bandung, Rafika Aditama, 2004, hlm. 63.

Prinsip-prinsip yang muncul tentang kedudukan konsumen dalam hubungan hukum dengan pelaku usaha berangkat dari doktrin atau teori yang dikenal dalam perjalanan sejarah hukum perlindungan konsumen, termasuk dalam kelompok ini adalah:⁸

- a. Let the buyer beware (caveat emptor)
- b. The due care theory
- c. The privity of contract
- d. Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

1) Let the buyer beware (caveat emptor)

Doktrin ini sebagai awalan dari lahirnya sengketa di bidang transaksi konsumen. Asas ini beranggapan pelaku usaha dan konsumen adalah dua pihak yang sangat seimbang sehingga tidak perlu ada proteksi apapun bagi konsumen. Tentu saja dalam perkembangannya konsumen tidak mendapat akses informasi yang sama terhadap barang atau jasa yang dikonsumsi, ketidakmampuan itu bisa karena keterbatasan pengetahuan konsumen, tetapi terlebih-lebih lagi disebabkan oleh ketidak terbukaannya pelaku usaha terhadap produk yang ditawarkan.

2) The due care theory

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk berhati-hati dalam memasarkan produk baik barang maupun

⁸ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2006, hal. 63.

jasa. Selama berhati-hati dengan produknya, ia tidak dapat dipersalahkan. Jika ditafsirkan secara *a-contrario*, maka untuk mempersalahkan pelaku usaha seseorang harus dapat membuktikan pelaku usaha tersebut melanggar prinsip kehati-hatian. Ditinjau dari beban pembuktian, tampak si penggugat (konsumen) harus membentangkan bukti-bukti. Si pelaku usaha (tergugat) cukup bersikap menunggu. Berdasarkan bukti-bukti kontra yang menyatakan dalam peristiwa tadi sama sekali tidak ada kelalaian (*negligance*). Dalam realita agak sulit bagi konsumen untuk menghadirkan bukti-bukti guna memperkuat gugatannya, sebaliknya si pelaku usaha dengan berbagai keunggulannya (secara ekonomis, sosial, psikologis, bahkan politis) relatif lebih mudah berkelit, menghindar dari gugatan demikian, disinilah kelemahan teori ini.

3) The privity of contract

Doktrin ini menyatakan pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk melindungi konsumen, tetapi hal ini baru dapat dilakukan jika diantara mereka telah terjalin suatu hubungan kontraktual. Pelaku usaha tidak dapat disalahkan atas hal-hal di luar yang diperjanjikan. Artinya konsumen boleh menggugat berdasarkan wanprestasi (*contractual liability*). Di tengah minimnya peraturan perundang-undangan di bidang konsumen, sangat sulit menggugat dengan dasar perbuatan melawan hukum (*toritius liability*). Walaupun secara

yuridis sering dinyatakan, antara pelaku usaha dan konsumen berkedudukan sama, tetapi faktanya konsumen adalah pihak selalu didikte menurut kemauan si pelaku usaha.

4) Prinsip kontrak bukan merupakan syarat

Setiap dengan bertambah kompleksnya transaksi konsumen, prinsip the privity of contract tidak mungkin lagi dipertahankan secara mutlak mengatur hubungan antara pelaku usaha dan konsumen. Jadi kontrak bukan lagi merupakan syarat untuk menciptakan eksistensi suatu hubungan hukum.

Dalam etika bisnis, dikenal adanya etika pengakuan yang melihat adanya asimetri dalam tugas dan kewajiban manusia, disamping itu terdapat teori pemeliharaan hak yang mengakui tanggung jawab produsen atas penjualan atas produk sebagai hasil hubungan yang asimetri antara pihak konsumen (yang lebih lemah) dan pihak produsen (yang lebih kuat). Teori ini melindungi hak-hak pihak yang lemah dan mendukung gagasan suatu masyarakat moral yang mempraktikkan keadilan.

Di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tidak hanya mencantumkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari konsumen, melainkan juga hak-hak dan kewajiban-kewajiban pelaku usaha, namun kelihatan bahwa hak yang diberikan kepada konsumen yaitu yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lebih banyak dibandingkan dengan hak

pelaku usaha yang dimuat dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan kewajiban pelaku usaha dalam Pasal 7 lebih banyak dari kewajiban konsumen yang dimuat dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

Selain itu dalam Pasal 16 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa melalui pesanan dilarang untuk :⁹

- a. Tidak menepati pesanan dan/atau kesepakatan waktu penyelesaian sesuai dengan yang dijanjikan;
- b. Tidak menepati janji atas suatu pelayanan dan/atau prestasi.

Sebagai konsekuensi dari hak konsumen, maka kepada pelaku usaha dibebankan kewajiban-kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, diantaranya :¹⁰

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;

⁹ Pasal 16 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

¹⁰ Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

- d. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu, serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan;
- f. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau jasa penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

Sebagai konsekuensi hukum dari pelanggaran yang diberikan Undang-undang tentang Perlindungan Konsumen dan sifat perdata dari hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen maka setiap pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha yang merugikan konsumen memberikan hak kepada konsumen yang dirugikan tersebut untuk meminta pertanggungjawaban dari pelaku usaha yang merugikan serta menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita oleh konsumen¹¹.

Tanggung jawab untuk mengganti rugi tidak saja karena dilakukannya perbuatan melanggar hukum, tetapi juga karena

¹¹ Gunawan Widjaja, Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2008, hlm. 3.

kelalaian atau kurang hati-hati, bahkan tanggung jawab itu tidak hanya karena perbuatan atau tidak berbuat pelaku itu sendiri, tetapi juga karena perbuatan atau tidak berbuat dari orang-orang yang menjadi atau termasuk tanggung jawabnya.

Namun apabila dalam penyelesaian sengketa konsumen melalui penyelesaian berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen dirasa belum memenuhi segala tuntutan dari konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha dan menuntut haknya untuk mendapatkan ganti atas kerugian yang dideritanya, maka dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyatakan : “Pelaku usaha yang menolak dan/atau tidak memberi tanggapan dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau mengajukan ke peradilan di tempat kedudukan konsumen”¹².

Tanggung jawab dalam hukum dibagi kedalam asas tanggung jawab berdasarkan kesalahan (liability based on fault) dan tanggung jawab tanpa kesalahan (liability without). Pada tanggung jawab berdasarkan kesalahan pihak yang menuntut ganti rugi (penggugat) diharuskan untuk membuktikan bahwa

¹² Pasal 23 Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

kerugian yang dialaminya disebabkan oleh perbuatan dan kesalahan dari pihak yang ia tuntutan untuk membayar ganti rugi tersebut (tergugat).

Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (fault liability atau liability on fould) adalah prinsip yang cukup umum berlaku dalam hukum pidana dan perdata. Dalam Kitab Undang-Undang Perdata, khususnya Pasal 1365, 1366 dan 1367, prinsip ini dipegang secara teguh. Prinsip ini menyatakan seseorang baru dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara hukum jika ada unsur kesalahannya. Yang dimaksud kesalahan adalah unsur yang bertentangan dengan hukum, tidak hanya bertentangan dengan Undang-Undang, tetapi juga kepatutan dan kesusilaan dalam Masyarakat.

Cara membedakan berbagai perilaku yang merugikan konsumen yaitu merupakan perbuatan melawan hukum (sebagai kasus perdata) dan tindak pidana. Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah memberikan akses dan kemudahan bagi hak-hak konsumen untuk mendapatkan ganti rugi dan sejumlah tuntutan yang menyangkut kepentingan konsumen dengan dirumuskan sistem pertanggungjawaban produk oleh pelaku usaha (Product liability)¹³.

¹³ AZ. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, CV. Triarga Utama, Jakarta, 2002, hlm. 77.

Tanggung jawab product (product liability) adalah tanggung jawab secara hukum dari orang atau badan yang menghasilkan suatu produk (producer, manufactur) atau dari orang atau badan yang bergerak dalam suatu proses untuk menghasilkan suatu produk (pro세서, assembler) atau dari orang atau badan yang menjual dan mendistribusikan (seller, distributor) produk tersebut.

Perbuatan melawan hukum (onrechmatige daad) dicantumkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata yang berisi “ Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut “.

Pengertian perbuatan melawan hukum di Indonesia diterjemahkan dari bahasa Belanda yaitu “Onerechmatige daad”. Dalam istilah “melawan” melekat pada sifat aktif dan pasif. Sifat aktif dapat dilihat apabila dengan sengaja melakukan suatu perbuatan yang menimbulkan kerugian orang lain, jadi sengaja melakukan gerakan sehingga nampak dengan jelas sifat aktifnya dari istilah “melawan” tersebut. Sebaliknya apabila ia dengan sengaja diam saja atau dengan perkataan lain apabila ia dengan sikap pasif sehingga menimbulkan kerugian pada orang lain maka ia telah “melawan” tanpa harus menggerakkan badannya.

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang lazim dikenal sebagai Pasal tentang perbuatan melawan hukum, mengharuskan terpenuhinya 4 (empat) unsur pokok yaitu :

- a) Adanya perbuatan;
- b) Adanya unsur kesalahan;
- c) Adanya kerugian yang diderita;
- d) Adanya hubungan kausalitas antara kesalahan dan kerugian.

Berhubung perusahaan PT. Akumobil ini berbentuk badan hukum yaitu PT atau (Perseroan Terbatas) maka untuk diminta pertanggung jawaban dari atas segala Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh perusahaan PT. Akumobil atau atas segala kerugian yang di derita oleh para orban Konsumen nya tersebut, maka bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan apabila segala harta kekayaan perusahaan atau aset perusahaan PT. Akumobil atau mengalami pailit, direksi dan komisaris mengambil penuh seluruh tanggung jawab atas segala kerugian hingga kepada harta milik pribadi. Sesuai yang di atur dalam Undang-Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

2. Konsepsi

Peranan konsep dalam penelitian ini adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam

hal-hal yang khusus. Dalam penelitian ini ada dua variable yang terkait yaitu : Pertama, pertanggungjawaban oleh perusahaan PT. Akumobil. Kedua, Persepektif Perlindungan Konsumen. Dari uraian kerangka teori diatas, peneliti akan menjelaskan beberapa konsep dasar yang akan digunakan dalam skripsi ini antara lain :

- 1) Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.
- 2) Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak diperdagangkan.
- 3) Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.
- 4) Skema Ponzi adalah modus penjualan ini yang membayarkan keuntungan kepada pembeli lain dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh pembeli berikutnya atau lebih sering dikenal dengan skema Piramida. Skema Ponzi biasanya membujuk para calon pembeli barudengan menawarkan keuntungan yang lebih tinggi dari yang lainnya. Kelangsungan dari keberhasilan dalam penjualan ini harus membutuhkan aliran yang terus menerus

meningkat dari uang yang didapat dari pembeli baru untuk menjaga kelangsungan skema ini terus berjalan.

- 5) Perseroan Terbatas (PT) adalah suatu bentuk badan usaha berbadan hukum dimana modalnya terdiri dari saham-saham, yang pemiliknya memiliki bagian sebanyak saham yang dimilikinya. PT atau Perseroan Terbatas juga dapat diartikan sebagai badan usaha yang melakukan persekutan modal (saham) dengan kemampuan mengatur saham dimana para pemilik modal mempunyai tanggungjawab sesuai dengan besar saham miliknya.
- 6) Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disingkat sebagai (BPSK) adalah salah satu lembaga peradilan konsumen berkedudukan pada tiap Daerah Tingkat Kabupaten dan Kota di seluruh Indonesia sebagaimana diatur menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen bertugas utama menyelesaikan persengketaan konsumen di luar lembaga pengadilan umum. Keputusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bersifat mengikat dan Penyelesaian akhir bagi para pihak.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan bersifat deskriptif analitis, yang memberikan paparan secara sistematis dan logis, serta kemudian menganalisanya, dalam rangka mengkaji bahan-bahan dari kepustakaan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

dikaitkan dengan teori-teori hukum yang menyangkut permasalahan yang dihadapi untuk menggambarkan dan menganalisis fakta-fakta secara sistematis, faktual, logis dan memiliki landasan pemikiran yang jelas¹⁴.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah:“ Pendekatan yuridis normatif, yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para ahli hukum, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dan permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut ”.

3. Tahap Penelitian

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan yaitu :¹⁵“ Penelitian terhadap data sekunder, dimana data sekunder dalam bidang hukum dipandang dari sudut kekuatan mengikatnya dapat dibedakan menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier “.

¹⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penulisan Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm.24.

¹⁵ *Ibid*, hlm. 11.

Penelitian ini dimaksudkan untuk mendapatkan data

sekunder, yaitu :

- a. Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat¹⁶, terdiri dari beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - 2) KUHPerdata
 - 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
 - 4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan pembayaran Utang.
 - 5) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
 - 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan.
 - 7) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁷. Bahan hukum sekunder bisa berupa buku-buku yang ada hubungannya dengan

¹⁶ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif "Suatu Tinjauan Singkat"*, Rajawali Pers, Jakarta, 1985, hlm. 11.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 14

penulisan skripsi atau seperti buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum yang relevan dengan judul yang dikaji oleh penulis.

- c. Bahan hukum tersier yaitu, bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder¹⁸.

Contohnya :

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Black's Law Dictionary;
- 3) Internet ;
- 4) dan lain-lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini, akan diteliti mengenai data sekunder dan data primer dengan demikian ada dua kegiatan utama yang dilakukan dalam melaksanakan penelitian ini, yaitu studi kepustakaan (Library Research) dan studi lapangan (Field Research).

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Studi kepustakaan yaitu suatu metode yang mempelajari dan meneliti literatur tentang hal-hal yang berhubungan dengan skema penjualan yang dilakukan oleh Perusahaan PT. Akumobil terhadap implementasi Perlindungan konsumen.

¹⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 15.

b. Studi Lapangan (Field Research)

Selain dengan menggunakan studi kepustakaan, dalam penelitian ini, peneliti juga menggunakan data lapangan untuk memperoleh data yang bersifat primer sebagai penunjang data sekunder yang dilakukan dengan cara mencari data di lokasi atau objek penelitian serta mengadakan tanya jawab (Wawancara) dengan para pihak kuasa hukum yang menangani kasus Akumobil tersebut.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan data baik dari perundang-undangan, wawancara, internet maupun buku-buku yang berkaitan dengan tanggung jawab perusahaan PT. Akumobil terhadap pengembalian dana dan kepastian hukum terhadap para konsumen. Alat yang digunakan oleh peneliti dalam memperoleh data sebagai berikut :

a. Data Kepustakaan

- 1) Menggunakan catatan untuk memperoleh data yang dilakukan secara tertulis.
- 2) Menggunakan laptop dalam memperoleh data yang diperoleh dari alamat website internet.
- 3) Menggunakan flashdisk sebagai penyimpan data yang diperoleh dari alamat website internet atau dari narasumber.

6. Analisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dianalisis dengan menggunakan metode yuridis Kualitatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai hukum positif. Yuridis Kualitatif yaitu analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi¹⁹, tentang tanggung jawab perusahaan PT.Akumobil terhadap pengembalian dana dan kepastian hukum terhadap para konsumen.

7. Lokasi Penelitian

Dalam hal ini penelitian untuk penulisan hukum ini berlokasi di tempat yang mempunyai korelasi dengan masalah yang dikaji oleh peneliti, adapun lokasi penelitian di bagi menjadi dua, yaitu :

a. Penelitian kepustakaan berlokasi di :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan bandung,
Jl. Lengkong Dalam No.17, Kota Bandung.

b. Penelitian Lapangan berlokasi di :

- 1) Kantor Biro Bantuan & Konsultasi Hukum (BBKH)
Universitas Pasundan, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Cikawao,
Kec. Lengkong, Kota Bandung.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 52.